

IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK TERHADAP MASYARAKAT (Studi pada Kantor Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan)

Bayu Eka Yaqsa¹, Khoiron², Taufiq Rahman Ilyas³

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam

Malang Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

Email: bayuekayaqsa123@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik di Desa Brenkok. Penulisan ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif yang menekankan pada konsep tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi transparansi, akuntabilitas, keterlibatan, dan efektivitas. Temuan penulisan menunjukkan bahwa konsep-konsep tersebut telah diterapkan secara efektif di Desa Brenkok. Layanan revolusioner "PEPES TAHU" mengefisienkan pemrosesan surat, meningkatkan akuntabilitas, dan mendorong efektivitas dan efisiensi layanan. Transparansi dicapai melalui papan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan meningkatkan tata kelola pemerintahan. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif berdampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan efektivitas administrasi desa.

Kata Kunci: Good Governance, Pelayanan Publik, Kinerja, Pemerintah Desa

Pendahuluan

Latar belakang penulisan ini membahas pentingnya pelayanan publik yang berkualitas sebagai bagian dari implementasi good governance di Indonesia. Meskipun good governance telah diterapkan sejak era Orde Baru, keberhasilannya masih belum optimal, terutama dalam pengelolaan pelayanan publik. Banyak masalah yang menghambat penerapan prinsip-prinsip good governance, seperti birokrasi yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas. Pelayanan publik yang buruk berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, memicu ketidakpuasan, dan memperkuat stigma negatif terhadap birokrasi.

Penulisan ini juga menyoroti peran otonomi daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab sepenuhnya dalam pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Meskipun ada beberapa perbaikan sejak reformasi birokrasi, pelayanan publik masih jauh dari harapan. Penulisan ini berfokus pada penerapan prinsip-prinsip good governance untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel.

Good governance dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan kepuasan

masyarakat, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang handal. Penulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi good governance dalam pelayanan publik, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan ke depan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Implementasi *Good governance* yang dijalankan di pemerintahan Desa Brengkok Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan?
2. Apa saja indikator yang digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja pemerintah desa menurut Werther & Davis (1996) pada elemen *validity*, *agreement*, *realism* dan *objective* di pemerintahan desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan?

Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Implementasi *Good governance* yang dijalankan di pemerintahan Desa Brengkok Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan.
2. Untuk Mengetahui indikator yang digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja pemerintah desa menurut Werther & Davis (1996) pada elemen *validity*, *agreement*, *realism* dan *objective* di

pemerintahan desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang memberikan gambaran tentang pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Menurut Sugiyono (2018:213) Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada Filsafat yang digunakan untuk kondisi ilmiah (eksperimen), dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan analisis bersifat kualitatif dan lebih menekankan pada makna. Metodologi Penelitian Kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau objek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi masyarakat individu atau kelompok.

Data-data disini diperoleh melalui proses pencarian dan juga pengamatan yang tepat berdasarkan sumber- sumber tertentu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:1) Data Primer dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara yaitu data yang diperoleh langsung dari informan sehingga pengumpulan data berupa tatap muka dan tanya jawab yang sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi keputusan, referensi-referensi peraturan perundang-undangan, dokumen, observasi, serta penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan penelitian. Sumber data sekunder ini merupakan sumber data yang sangat melengkapi serta memperbanyak untuk mendukung data primer.

Pembahasan

A. Implementasi *Good Governance* pada Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat.

1. Akuntabilitas

Penulisan ini membahas penerapan prinsip *good governance* di Desa Brengkok dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik. Fokus utama adalah pada prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efektivitas. Hasil penulisan menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan baik. Akuntabilitas terlihat dari pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seluruh aparatur desa, termasuk inovasi dalam pelayanan bernama PEPES TAHU (Pelayanan Pesan Tanpa Tunggu), yang mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen seperti KTP, KK, dan surat pindah tanpa harus melalui calo. Transparansi ditunjukkan dengan penyediaan papan informasi yang

memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi terkait pemerintahan. Partisipasi masyarakat juga terwujud melalui keterlibatan mereka dalam penyampaian aspirasi. Secara keseluruhan, penerapan prinsip *good governance* telah membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik di Desa Brengkok.

2. Akuntabilitas

Pembahasan ini mengulas penerapan prinsip transparansi dalam pelayanan publik di Desa Brengkok. Meskipun pemerintah desa berusaha terbuka dengan memberikan informasi tentang kebijakan dan kegiatan, beberapa warga masih merasa kesulitan dalam mendapatkan pelayanan yang objektif dan transparan. Masalah ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara aparatur pemerintah dan masyarakat.

Wawancara dengan warga menunjukkan bahwa mereka menginginkan informasi yang lebih jelas, seperti melalui papan informasi, untuk memahami persyaratan pelayanan. Kepala Desa, Bapak Nuriyadi, menjelaskan bahwa pemerintah desa telah berupaya transparan untuk menghindari praktik negatif, seperti korupsi. Meskipun ada papan informasi yang disediakan, banyak warga yang belum memanfaatkannya secara maksimal.

Secara keseluruhan, meskipun pemerintah Desa Brengkok telah melakukan langkah-langkah positif dalam menerapkan transparansi, masih diperlukan peningkatan dalam komunikasi dan partisipasi masyarakat agar informasi dapat disampaikan dengan lebih efektif.

3. Partisipasi

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di Pemerintahan Desa Brengkok. Kepala Desa, Bapak Nuriyadi, menegaskan bahwa keputusan selalu melibatkan perwakilan masyarakat, yang membantu meningkatkan koordinasi dan kualitas pelayanan. Ibu Maswatin, Kepala Seksi Pemerintahan, serta Bapak Rodi Santoso, Sekretaris Desa, juga menyatakan bahwa partisipasi masyarakat penting untuk mengidentifikasi masalah dan meningkatkan kinerja administrasi.

Namun, ada pandangan dari beberapa warga yang merasa bahwa partisipasi dalam keputusan masih kurang, sehingga menghasilkan kesan bahwa prosesnya masih sepihak. Bapak Nuriyadi merespons bahwa pemerintah desa sudah terbuka dan mengundang masyarakat untuk berpartisipasi, namun masyarakat mungkin kurang memahami cara untuk terlibat

4. Efektivitas

Efektivitas diartikan sebagai kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan disiplin. Namun, berdasarkan wawancara dengan warga, banyak yang merasa bahwa pelayanan masih kurang efektif, terutama karena adanya ketidakdisiplinan dari beberapa petugas yang menyebabkan antrian dan waktu tunggu yang lama.

Kepala Desa, Bapak Nuriyadi, berusaha untuk meningkatkan efektivitas dengan menyederhanakan prosedur pelayanan. Namun, ia mengakui ada beberapa pegawai yang kurang disiplin, yang bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti jarak ke kantor atau urusan mendadak. Masyarakat juga mengungkapkan harapan agar ada sistem pelayanan yang lebih baik dan evaluasi rutin untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Salah satu inisiatif yang diterapkan adalah pelayanan PEPES TAHU (Pesan Tanpa Tunggu), yang memungkinkan masyarakat mengajukan berkas secara langsung tanpa harus menunggu lama. Namun, masih ada tantangan dalam hal disiplin pegawai yang mempengaruhi efektivitas pelayanan.

B. Indikator yang digunakan untuk pengukuran dan penilaian kinerja pemerintah desa menurut Werther & Davis (1996)

1. Produktivitas

hasil survei terkait tingkat produktivitas pemerintahan Desa Brengkok dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik. Mayoritas responden (60% - 80%) setuju bahwa pemerintah desa telah menunjukkan produktivitas yang baik dalam menerapkan prinsip Good Governance.

Pada item pertama, 75% responden menyatakan bahwa aparatur desa telah mencapai tujuan dengan baik, dan 75% responden juga setuju bahwa etika kerja aparatur desa sudah sesuai. Sebanyak 60% responden menyatakan bahwa aparatur desa memiliki inisiatif yang tinggi dalam bekerja, sementara 80% responden menilai sarana dan prasarana sudah memadai untuk operasional kerja.

Kepala Desa Brengkok, Bapak Nuriyadi, menegaskan bahwa evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik. Meskipun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, secara keseluruhan, kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik dinilai baik oleh mayoritas masyarakat. Hasil kuesioner dan wawancara mengindikasikan bahwa produktivitas

pemerintah desa sudah berjalan cukup baik, meski masih ada ruang untuk penyempurnaan.

2. Kualitas Pelayanan

Dari hasil kuesioner mengenai kualitas pelayanan publik di Desa Brengkok, mayoritas responden menyatakan bahwa pelayanan sudah berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa yang merasa kurang konsisten. Sebanyak 70% responden setuju bahwa aparatur desa telah menunjukkan keramahan dalam memberikan pelayanan, namun 55% responden menilai bahwa kinerja aparatur desa masih kurang konsisten dan tidak selalu tepat waktu dalam pelayanan.

Aparatur desa, seperti yang disampaikan oleh Bapak Rodi Susanto, menyatakan bahwa pelayanan publik dilakukan dengan ramah karena mereka juga bagian dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Namun, beberapa warga, seperti Bapak Suyatno, mengeluhkan proses administrasi yang lama, meskipun mengakui bahwa pelayanan sekarang lebih efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa kekurangan, kualitas pelayanan di Desa Brengkok dinilai sudah baik oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori Sedarmayanti (2009), yang menyebutkan bahwa pelayanan adalah kegiatan melayani masyarakat sebagai bagian dari tugas administrasi negara.

3. Responsivitas

Dari hasil kuesioner terkait responsivitas, sebagian besar responden menyetujui bahwa aparatur desa di Desa Brengkok cepat dan tanggap dalam memberikan pelayanan publik. Sebanyak 60% responden merasa aparatur desa responsif, sementara 65% menyatakan bahwa pemerintah desa mudah ditemui untuk menerima pengaduan masyarakat. Responsivitas ini juga terlihat dalam penanganan aspirasi serta keluhan dari masyarakat.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Yani Nur Farahim, aparatur desa sangat cepat menanggapi kritikan dan permintaan terkait pengurusan surat kematian, yang mempermudah proses bagi keluarga. Meskipun belum sempurna, responsivitas pemerintah desa sudah cukup baik. Hal ini sejalan dengan gagasan Dwiyanto yang menyatakan bahwa daya tanggap adalah kapasitas suatu organisasi untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

4. Responsibilitas

Mayoritas responden setuju bahwa sanksi yang tegas harus dijatuhkan kepada aparat Desa Brenkok atas pelanggaran peraturan atau kekurangan disiplin, dengan 55% mendukung penegakan sanksi tersebut. Bapak Rody Santoso, Sekretaris Desa Brenkok, menjelaskan bahwa hukuman diberikan melalui Surat Peringatan (SP), yang berkembang dari SP 1 hingga SP 3, sebagai langkah tegas untuk meningkatkan disiplin dan kinerja pejabat. Pendekatan ini, termasuk inisiatif PEPES TAHU, diantisipasi untuk memfasilitasi pencapaian tujuan layanan yang lebih baik. Meskipun ada potensi untuk perbaikan, hukuman yang tegas telah membantu pemerintah desa dalam meningkatkan disiplin dan kemandirian dalam pelaksanaan prinsip-prinsip administrasi yang baik, sejalan dengan tujuan organisasi, baik secara terang-terangan maupun terselubung. (Lenvire, 1990).

5. Akuntabilitas

Berdasarkan hasil kuesioner mengenai akuntabilitas, sebagian besar responden menyetujui bahwa aparatur Desa Brengkok telah menjalankan mekanisme kerja dengan baik, dengan 85% responden setuju bahwa prosedur kerja dipatuhi. Sebanyak 70% responden juga menyatakan pembagian tugas dan wewenang sudah jelas, dan 80% responden setuju bahwa aparatur desa bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Ibu Afira Fatmawati, salah satu warga, menyatakan puas dengan mekanisme kerja yang diterapkan. Hal ini diperkuat oleh Bapak Rudy Santoso yang menegaskan bahwa pembagian tugas di Desa Brengkok sudah diatur dengan baik.

Walaupun masih ada kendala dalam pelaporan pertanggungjawaban, secara keseluruhan akuntabilitas di Desa Brengkok berjalan dengan baik. Ini sejalan dengan pendapat Sedarmayanti (2004:7) bahwa akuntabilitas adalah kewajiban aparatur pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang diambil.

6. Transparansi

Berdasarkan hasil kuesioner mengenai transparansi, sebagian besar responden menyetujui bahwa aparatur Desa Brengkok telah mampu memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, dengan 70% responden setuju mengenai hal ini. Selain itu, 75% responden menyatakan bahwa aparatur desa mampu menyikapi informasi yang diberikan masyarakat dengan baik. Menurut Ibu Zuliyatin, Kaur Keuangan Desa Brengkok, transparansi sangat penting dalam

pemerintahan, terutama dalam pelayanan publik. Meskipun belum sempurna, transparansi di Desa Brengkok sudah berjalan cukup baik. Pemerintah desa terbuka dalam memberikan informasi dan mengambil keputusan, sesuai dengan prinsip good governance yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2004:7), bahwa transparansi merupakan ciri penting pemerintahan yang baik.

7. Partisipasi

Berdasarkan hasil kuesioner mengenai indikator partisipasi, mayoritas responden menyetujui bahwa aparatur Desa Brengkok mampu menerima saran dan pendapat yang baik dalam proses perumusan kebijakan. Sebanyak 75% responden menyatakan bahwa aparatur desa terbuka terhadap masukan, dan 85% menyetujui bahwa pemerintah desa mampu menampung informasi beragam dari masyarakat. Ibu Handayani, Kaur Perencanaan Desa Brengkok, menekankan pentingnya partisipasi sebagai bahan evaluasi bagi aparatur desa.

Walaupun partisipasi ini sudah berjalan cukup baik, masih ada kendala dalam mengelola masukan dari masyarakat dan perangkat desa. Prinsip partisipasi ini sesuai dengan pandangan UNDP dan Sedarmayanti (2009:290), yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan tentang Implementasi Good Governance pada Pemerintahan Desa Brengkok dalam meningkatkan pelayanan publik, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Good Governance** telah melibatkan semua pemangku kepentingan, baik dari birokrasi maupun masyarakat. Pemerintahan Brengkok menjalankan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dengan baik.
2. **Akuntabilitas** diimplementasikan dengan baik melalui pelayanan yang praktis, seperti program *PEPES TAHU* yang memudahkan pengurusan surat-surat dan mengurangi biaya dari perantara.
3. **Transparansi** diwujudkan melalui papan informasi yang memudahkan masyarakat untuk mengakses pengumuman dan jadwal kegiatan pemerintah desa.
4. **Partisipasi** masyarakat diupayakan dengan melibatkan warga secara aktif, baik dalam

fisik maupun dalam menyampaikan aspirasi terkait desa.

5. **Efektivitas** pelayanan ditingkatkan melalui program *PEPES TAHU*, yang membuat proses administrasi lebih cepat dan efisien.
6. Penerapan prinsip **Good Governance** di Desa Brengkok telah meningkatkan pelayanan publik dan menunjukkan perubahan positif dalam pola pikir dan perilaku aparatur desa yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Saran

Untuk meningkatkan penerapan *Good Governance* di Desa Brengkok, diperlukan dua hal utama:

1. **Komunikasi efektif** antara pemerintah desa dan masyarakat mengenai indikator pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah dengan baik dan merasa puas.
2. **Peningkatan partisipasi masyarakat** melalui edukasi, agar masyarakat memahami peran dan pentingnya *Good Governance* dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa.

Kedua langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat serta meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Daftar Pustaka

- Cahyadi, Arif. "Penerapan good governance dalam pelayanan publik (studi tentang kualitas pelayanan elektronik kartu tanda penduduk berbasis good governance di Kecamatan Sukolilo Surabaya)." *JPAP: Jurnal Penulisan Administrasi Publik* 3.2 (2017).
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- H.A.W. Widjaja. 2010. "*Otonomi Desa*" Jakarta: PT. Raja Grafindo persada. Hlm 3.
- Herviani dan Febriansyah, 2016. Tinjauan atas Proses Penyusunan Laporan keuangan pada *Young Entrepreneur Academy* Indonesia Bandung, Jurnal Riset Akutansi Vol VII/No/2/Oktober.
- Hoessein, Benjamin. 2001 "*Transparansi Pemerintah*" Jurnal Forum inovasi, November.
- Ismayanti, (2021) *Implementasi Prinsip- Prinsip Good Governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kantor kecamatan Masalle kabupaten Enrekang*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Mappaodang A. 2021. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* di kantor kecamatan Mariorowawo Kabupaten Soppeng. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Nisjar, 1997. Teori Sistem dan Pendekatan Sistem dalam Bidang Manajemen.
- Osborne dan Gaebler, 1992. *Renueting Government : How the Enterpreneurial Spirit is Transforming the Publik Sektor*.
- Paputungan, Mustary Putra Pratama, Johny Lumolos, and Stefanus Sampe. "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TINGKAT PELAYANAN PUBLIK PT. PERTAMINA (Studi Di SPBU Kelurahan Mongkonai Barat Kota Kotamobagu)." *JURNAL EKSEKUTIF* 1.2 (2021).
- Ratminto. Atik Septi Winarsih. 2007. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hlm 128.
- Riawan. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan. Hlm 15.
- Ridwan. 2010. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penulisan*. Bandung: Alfabeta. Hal 51.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik" Kepemeritahan ang baik "Dalam Rangka Otonomi Daerah"* Bandung: CV. Mandar Maju.
- Semil, Nurmah. 2005, *Analisis' Cinema Pelayanan Publik Instansi Pemerintah*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sinambela. 2006. *Reformasi Pelayanan publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Situmeang, Sevocto. "Analisis Implementasi Prinsip Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Sibolga." (2022).
- Sugiman, *Pemerintahan Desa*, Ilmiah Mahasiswa Bina Mulia Hukum Universitas Suryadarma, Jurnal Vol.7 No.1, Juli 2018, Hlm. 86
- Sutardjo Kartohadikusumo. 1953. "*Desa*" Bandung: Sumur Bandung. Sugiman, Sugiman. "Pemerintahan Desa." *Binamulia Hukum* 7.1 (2018): 82-95.
- Suryantoro, Bambang, and Yan Kusdyana. "Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Politeknik Pelayaran Surabaya." *Jurnal Baruna Horizon* 3.2 (2020): 223-229.
- T.Choser dan Anthony Rosenberg. 1976. *An introduction to international politics*. New Jersey: Prentice Hall.
- Trisno, A. 2017, Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam pelayanan publik di kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal ilmu pemerintahan. Volume (1)* 1.
- Ulum Bahrul. 2021. Skripsi Dengan Judul *Kebijakan Penerapan Dalam Tarif Pajak*

Surat Keterangan Asal Barang (SKAB),
Universitas Islam Malang: Malang.
Wahyiah, Ita Rosita, and Luis Fiska Rahayu.
"Analisis Penyelenggaraan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik (Good
Governance) Di Kecamatan
Sindangresmi Pandeglang Banten."

Zulkarnain. 2002. *Kendala Terwujudnya*

*Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik
Lokal dan Pembangunan* 9.3 (2023).
Yuliana, S. 2014. *implementasi prinsip-Prinsip
Good Governance. Dalam meningkatkan
kinerja organisasi di bidang pelayanan
publik pada kantor kecamatan Parigi di
Kabupaten Pangandaran.* Dinamika.
Universitas Galuh: Ciamis.